

ABSTRAK

Perumahan di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah penduduk yang semakin meningkat berkorelasi terhadap kebutuhan akan perumahan layak yang semakin mendesak mengakibatkan masyarakat kesulitan memiliki rumah sehingga dibentuk program Tabungan Perumahan Rakyat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 adalah program penyimpanan yang dilakukan oleh peserta tapera secara berkala dalam jangka waktu yang dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan terutama bagi MBR. Pada pasal 5 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mewajibkan pekerja dan pekerja mandiri sebagai peserta. Pekerja yang menerima upah atau penghasilan tetap lebih terjamin tentang keberlangsungan kepesertaan Tapera daripada pekerja mandiri yang tidak dapat memastikan penghasilan mereka namun, pernyataan ini mengakibatkan problem dalam masyarakat tentang keadilan bagi peserta program tapera. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kewajiban kepesertaan pekerja mandiri mengikuti program tapera sesuai teori keadilan John Rawls dengan menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sumber data dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pekerja mandiri dalam Program Tapera diatur dalam PP No. 25 Tahun 2020 yang bertentangan dengan teori keadilan John Rawls, karena membebani kelompok pekerja mandiri yang ekonominya rentan dan tidak adil sebagai kewajiban. Program ini seharusnya disusun lebih inklusif, memperhatikan prinsip kebebasan yang sama serta kebutuhan kelompok rentan, agar menjadi instrumen keadilan sosial dalam akses perumahan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Kata Kunci: Pekerja Mandiri, Program Tapera, Keadilan John Rawls

ABSTRACT

Housing in Indonesia has faced significant challenges during President Joko Widodo's administration, particularly among low-income communities (MBR). The increasing population correlates with the growing urgency for decent housing, making it difficult for many people to afford a home. This led to the establishment of the Public Housing Savings Program (Tapera). Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2016 introduces a savings program in which Tapera participants contribute regularly over a certain period, with the funds intended primarily for housing financing for low-income groups. Article 5 paragraph (3) of Government Regulation No. 25 of 2020 concerning the Implementation of the Public Housing Savings Program mandates both wage-earning workers and self-employed individuals to become participants. Workers with regular income have more security in their Tapera membership compared to self-employed individuals, who may not have stable earnings. However, this regulation has raised concerns in society regarding fairness for Tapera program participants. This study aims to examine whether the obligation for self-employed workers to join the Tapera program aligns with John Rawls' theory of justice, using a statutory approach and conceptual approach for data sources and analysis. The results of the research indicate that the obligation imposed on self-employed workers under Government Regulation No. 25 of 2020 contradicts John Rawls' theory of justice, as it imposes a burden on economically vulnerable groups and fails to uphold fairness. The program should be restructured to be more inclusive, taking into account the principle of equal liberty and the needs of vulnerable groups, so that it can serve as an instrument of social justice in providing housing access for all workers in Indonesia.

Keywords: Self-Employed Workers, Tapera Program, John Rawls Justice